

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

Tahun 2014 BAPPEDA DIY mendapat Anggaran Belanja sebesar Rp. 24.373.703.317,- realisasi Rp. 22.830.292.152,- atau sebesar 93,67% dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (*Gaji dan Tunjangan Pegawai*)

Jumlah Anggaran	Rp. 6.033.969.657,-
Realisasi	<u>Rp. 5.848.438.302,-</u>
Sisa	Rp. 185.531.355,-

✚ Anggaran Belanja Tidak Langsung sisa karena adanya satu Pegawai Negeri Sipil Bappeda DIY mengundurkan diri sebagai PNS atas permintaan sendiri, adanya mutasi pegawai, pensiun, dan perubahan anggota keluarga.

2. Belanja Langsung (*terdiri dari 12 Program 76 Kegiatan*)

Jumlah Anggaran	Rp. 18.339.733.660,-
Realisasi	<u>Rp. 16.981.853.850,-</u>
Sisa	Rp. 1.357.879.810,-

Belanja Langsung terdiri dari :

a) Belanja Pegawai :

Jumlah Anggaran	Rp. 2.383.375.200,-
Realisasi	<u>Rp. 2.310.427.400,-</u>
Sisa	Rp. 72.947.800,-

b) Belanja Barang Jasa :

Jumlah Anggaran	Rp. 12.511.336.225,-
Realisasi	<u>Rp. 11.581.401.140,-</u>
Sisa	Rp. 929.935.085,-

c) Belanja Modal :

Jumlah Anggaran	Rp. 3.445.022.235,-
Realisasi	<u>Rp. 3.090.025.310,-</u>
Sisa	Rp. 354.996.925,-

Secara umum capaian fisik Tahun 2014 sebesar 99,71%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,67%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang realisasi kurang dari 90% antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi 86,20% disebabkan efisiensi/menyesuaikan kebutuhan.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi 80,79% disebabkan efisiensi, menyesuaikan tariff rekening.
3. Penyediaan Administrasi Keuangan realisasi 88,35% disebabkan honorarium tidak dibayarkan karena kekurangan 2 personil pengelola keuangan sehingga ada rangkap jabatan yaitu pembuat dokumen dan pencatat pembukuan.
4. Penyediaan makan dan minuman realisasi 67,70% disebabkan karena efisiensi, menyesuaikan kebutuhan
5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor realisasi 89,67% disebabkan adanya sisa lelang.
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional realisasi 53,35% disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan disamping adanya beberapa kendaraan yang dihapuskan (3 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2).
7. Pendidikan dan pelatihan formal realisasi 78,20% disebabkan kursus LAKIP dan Pengaturan Zonasi tidak dilakukan karena tidak ada lembaga tingkat pusat yang menyelenggarakannya.
8. Fasilitasi Kegiatan Jabatan Fungsional Tertentu realisasi 65,96% disebabkan efisiensi belanja jasa tenaga ahli/instruktur dan perjalanan dinas luar daerah.
9. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah realisasi 81,49% disebabkan adanya sisa lelang.

10. Koordinasi Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah (PK) realisasi 77,59% dikarenakan efisiensi belanja cetak/menyesuaikan kebutuhan (*ketebalan dokumen*).
11. Fasilitasi Pemberantasan Korupsi realisasi 87,38% disebabkan ketidakhadiran narasumber pusat sehingga honorarium, akomodasi dan bantuan transport tidak terserap/tidak diberikan.
12. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDG's realisasi 88,51% disebabkan adanya surat edaran Menpan Nomor 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor, sehingga pelaksanaan workshop dilakukan diinstansi pemerintah.
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup realisasi 88,69% disebabkan efisiensi perjalanan luar daerah dan jamuan rapat